



RENCANA STRATEGIS 2023-2026

**pemerintah provinsi
sulawesi barat**

• dinas perkebunan daerah

CONTACT US

@PROVDISBUNSULBAR
MAMUJU



RENCANA STRATEGIS 2023-2026



**pemerintah provinsi
sulawesi barat**

dinas perkebunan daerah

CONTACT US
@PROVDISBUNSULBAR
MAMUJU

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahuwata'ala dan rasa syukur kami haturkan kepada Nya yang dengan izin-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 bisa diselesaikan sesuai dengan rencana. Dokumen ini merupakan implementasi dari RPJMD yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi barat periode 2023-2026 agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perkebunan dengan arah kebijakan menuju pada peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan kelembagaan dan usaha perkebunan, serta peningkatan sarana dan perasarana perkebunan.

Renstra Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan selama 4 tahun kedepan (2023-2026). Kami mengharapkan semoga dokumen ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya. Demi perbaikan kedepannya kami juga mengharapkan kritik, saran, masukan positif yang sifatnya membangun, dan dukungan oleh semua pihak demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan, atas bantuan dari semua pihak terkait dengan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 ini diucapkan banyak terima kasih.

Mamuju, 2022
Kepala Dinas Perkebunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat



SYAMSUL MA'RIF, SP.MMA
NIP. 19880513 199803 1 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 LATAR BELAKANG	5
I.2 LANDASAN HUKUM	7
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	12
I.3.1 Maksud	12
I.3.2 Tujuan	12
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	14
II.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
II.1.1 Struktur Organisasi	15
II.2 SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	17
II.2.1 Organisasi dan Kepegawaian	17
II.2.2 Sarana dan Prasarana	19
II.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	20
II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	22
II.4.1 Tantangan	22
II.4.2 Peluang	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	25
III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	25
III.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024 DAN TAHUN 2020 - 2024	37
III.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS	40
III.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	68



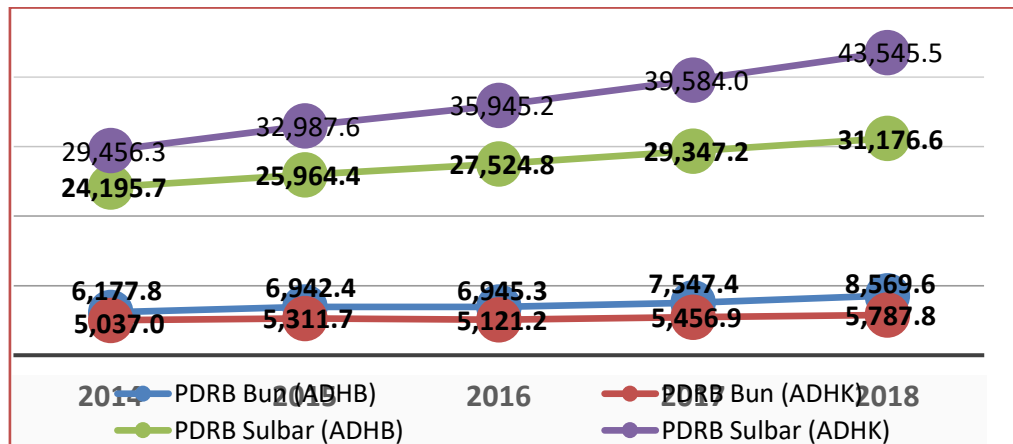
BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan usaha pertanian dengan menanam tanaman yang menghasilkan komoditi yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut setelah dipanen dan biasanya tidak dikonsumsi secara lokal, namun diperdagangkan dalam skala besar. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami perubahan sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perkebunan mampu menyerap tenaga kerja dari sektor hulu hingga ke hilir, dan juga merupakan salah satu komoditi ekspor non-migas penting dalam menyumbang devisa negara.

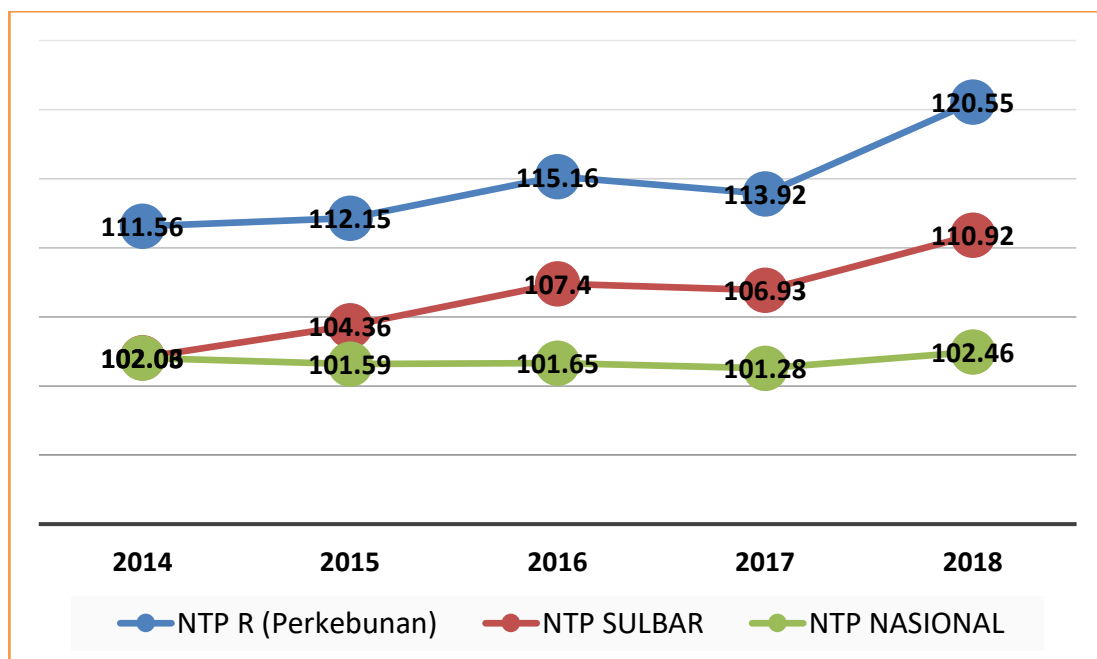
Di Provinsi Sulawesi Barat, lapangan usaha pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam perekonomian wilayah, meliputi 42,32% dari total PDRB Sulawesi Barat (BPS, 2018). Sub sektor perkebunan sendiri dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2014 – 2018) berkontribusi 20,97% – 19,68% dari total PDRB (ADHB). Komoditi yang berperan dalam menggerakkan ekonomi Sulawesi Barat yakni kakao, kelapa sawit, kopi, kelapa dalam dan cengkeh.

Grafik 1-1. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat dengan PDRB Tanaman Perkebunan (Rp. M), Tahun 2014 - 2018



Disamping itu, perkebunan juga menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan sub-sektor pertanian lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan NTP sub-sektor perkebunan yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata NTP Sulawesi Barat dan NTP Nasional dalam rentang waktu 2014 – 2018, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1-2. Perbandingan Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP R) dengan rata-rata NTP Sulawesi Barat dan rata-rata NTP Nasional, Tahun 2014 - 2018



Sumber: BPS-Sulbar, Sulawesi Barat Dalam Angka 2015 - 2019

Peran strategis sub sektor perkebunan dalam menggerakkan ekonomi wilayah dan mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Barat, serta tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk satu OPD tersendiri yakni Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas ini menjadi *leading sector* pembangunan perkebunan di Sulawesi Barat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan, secara sistematis dan terkoordinasi diantara semua stakeholder perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.



Berdasarkan hal tersebut dan sebagai wujud kepatuhan pada amanat peraturan dan perundang-undangan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Renstra Dinas Perkebunan memuat rencana strategis pembangunan sub sektor perkebunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Proses penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan melalui tahapan; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat karena merupakan bagian dari dokumen tersebut. Dokumen Renstra ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas, serta menjadi perangkat/dokumen yang mendasari pengukuran kinerja Dinas Perkebunan setiap tahunnya.

I.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3585);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura;



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 51).
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- 1) Memberikan arah bagi rencana kerja pembangunan perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat hingga 4 (empat) tahun mendatang, tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 2) Memberikan pedoman kepada para pemangku kepentingan dalam pembangunan perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

I.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan:

- 1) Menjabarkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 kedalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Menyediakan rencana implementasi program/kegiatan dan penetapan target waktu capaian pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang terukur;
- 3) Menjamin pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan terarah dan tepat sasaran;
- 4) Menjadi instrumen keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkebunan.

I.4 Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Daerah (Renstra SKPD), menjelaskan dan menetapkan tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD yang



terdiri dari 8 (delapan) bab dan sub-sub bab yang akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII. Penutup



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan dibidang perkebunan meliputi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara administrasi dan kelembagaan, Dinas Perkebunan merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur dalam menjalankan pemberdayaan dan pembangunan perkebunan. Secara kelembagaan, Dinas Perkebunan sebagai salah satu OPD dalam sistem administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai fungsi (Tupoksi) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan.
- b. Penyusunan program Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan.
- c. Penyelenggaraan penataan Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan.
- d. Penyelenggaraan pengawasan Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan.
- e. Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkebunan.
- f. Penyelenggaraan pembinaan Perbenihan dan Produksi Perkebunan.
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman Perkebunan.
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang Perkebunan.



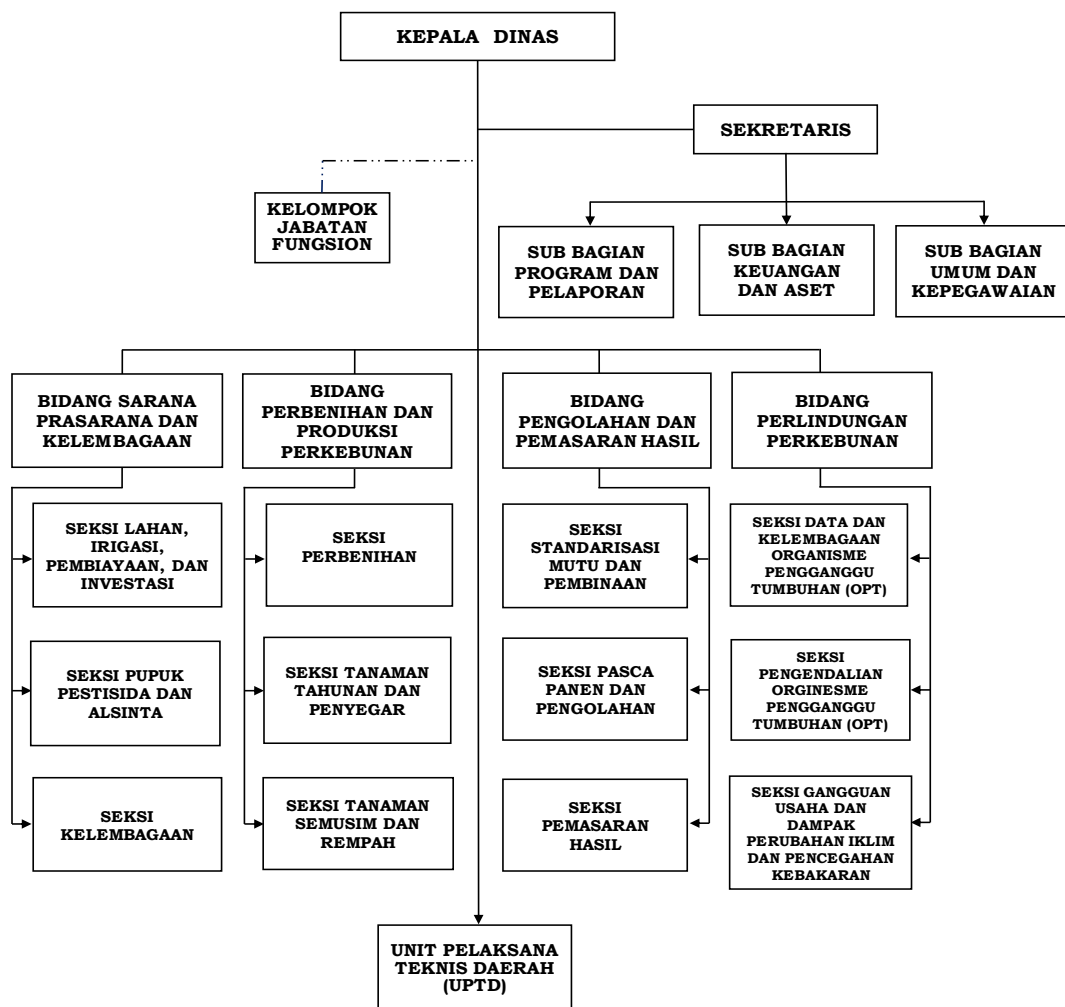
- j. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perkebunan.
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan.
- l. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.
- m. Pelaksanaan administrasi bidang perkebunan.
- n. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan.

II.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Perkebunan digambarkan pada diagram berikut (**Gambar 2-1**).

Gambar 2-1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



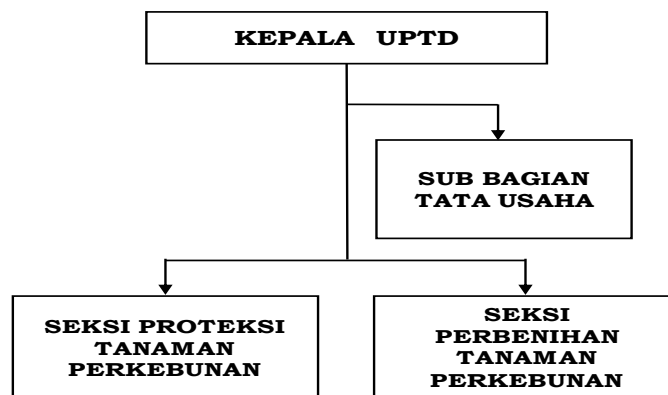
Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 Tahun 2019
 Tanggal : 15 April 2019
 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016
 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGAWASAN,
SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 Tahun 2019
 Tanggal : 15 April 2019
 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PROTEKSI DAN
PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 Tahun 2019
 Tanggal : 15 April 2019
 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat



II.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Implementasi tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan misi dalam mewujudkan visi, memerlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Diperlukan pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, serta sumberdaya penunjang lainnya. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia, prasarana dan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diuraikan berikut ini.

II.2.1 Organisasi dan Kepegawaian

Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Perkebunan Sulawesi Barat sebanyak 28 jabatan, terdiri dari: seorang Pejabat Eselon II (Kepala Dinas); 7 orang Pejabat Eselon III (Kepala Bidang, dan Kepala UPTD.); dan Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi dan Kasubag) sebanyak 7 orang; sedangkan pejabat fungsional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional umum 14 orang. Kondisi kepegawaian Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 sebanyak 80 orang PNS serta 52 orang honorer dan 82 tenaga pendamping lapangan/fasilitator perkebunan. Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan unit kerja dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2-1 Jumlah/ Komposisi Pegawai menurut Golongan dan Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

No	Unit Kerja	PNS Golongan (org)				Non-PNS (org)			Jml (org)
		IV	III	II	I	Honorer	TKP/ PLP	Fasilitator	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat (Sekretaris Dinas)	1							1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		2	3		14			19
4	Sub Bagian Keuangan	1	2	2		4			9
5	Sub Bagian Program dan Pelaporan		3	2		5			10
6	Bidang-Bidang	5	25	4		12	78	4	128
7	UPTD	3	17	9		17			46
	Jumlah	11	49	20		52	78	4	214

Sumber: DUK Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022



Berdasarkan tingkat pendidikan ASN-PNS, rincian jumlah dan komposisi pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menurut pendidikan terakhir dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Jumlah/Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pendidikan dan Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

No	Unit Kerja	Pendidikan (orang)							Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas						1		1
2	Sekretariat						1		1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			2		3			5
4	Sub Bagian Keuangan			1		2	2		5
5	Sub Bagian Program dan Pelaporan			1		3	1		5
6	Bidang-Bidang			4		20	10		34
7	UPTD			7	2	18	2		29
	Jumlah			15	2	46	17	0	80

Sumber: DUK Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Data pilah gender Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2-3.

Tabel 2-3 Jumlah/Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pilah Gender Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Pangkat		
	- Golongan IV	7	4
	- Golongan III	26	23
	- Golongan II	13	7
	- Golongan I	-	-
	Jumlah	46	34
2	Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Struktural	15	8
	Diklat Teknis	6	4
	Diklat Fungsional		
	Jumlah	21	12

Sumber: DUK Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022



Tabel 2-4 Jumlah/Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Kebutuhan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kebutuhan Pegawai	Berdasarkan kompetensi		Belum terisi	Jumlah
		Sesuai	Belum sesuai		
1.	Jabatan Tinggi Pratama	1	0	0	1
2.	Administrator/	7	0	0	7
3.	Pengawas	7	0	0	7
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	14	0	27	41
5.	Jabatan Pelaksana	51	0	29	80
	Jumlah	80	0	56	136

Berdasarkan hasil pemetaan jabatan dan analisis beban kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat setidaknya membutuhkan 136 orang pegawai negeri sipil mulai dari jabatan tinggi pratama sampai dengan jabatan pelaksana, untuk mendukung pencapaian tujuan/target OPD.

II.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sangat terbatas, kurang memadai bahkan sudah tidak layak pakai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran ataupun tugas pokok fungsi secara keseluruhan. Semua sarana seperti komputer dan perangkat pendukungnya, mebeleur dan lain-lain berasal dari sarana perkantoran Dinas Perkebunan yang lama (dilebur ke dinas pertanian pada tahun Desember 2016 – April 2019). Sehingga umur pakai sebagian besar sarana berusia diatas 10 tahun. Prasarana gedung kantor sendiri, masih menempati Kantor UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, yang kurang representatif untuk aktivitas sebuah dinas.

Selain hal tersebut, Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki infrastruktur pendukung yang tersebar di 6 (enam) kabupaten, yaitu:



1. UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kelurahan Rangas Kabupaten Mamuju;
2. UPTD Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sub Station Penelitian Kakao di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kebun Induk Kakao di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kebun Induk Kelapa di Desa Pucceda Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kebun Induk Kelapa di Desa Simbang Kabupaten Majene;
7. UPP di Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju
8. UPP di Kecamatan Pellatoang Kabupaten Majene
9. UPP di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
10. UPP di Kecamatan Wonomulio Kabupaten Polewali Mandar
11. UPP di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
12. UPP di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
13. UPP di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
14. UPP di Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu

Saat ini beberapa kantor UPP tidak lagi aktif dan sebagian besarnya dimanfaatkan bersama dengan Dinas Kabupaten.

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Target kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada periode RPJMD yang lalu secara umum masih sama dengan target RPD periode ini. Pembangunan sub sektor perkebunan ditargetkan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani perkebunan. Kontribusi ini diukur dengan indikator dari capaian target peningkatan produksi dan besaran PDRB sub sektor perkebunan setiap tahunnya, sedangkan peningkatan kesejahteraan petani diukur dengan peningkatan produktivitas dan NTP itu sendiri. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2-5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kontribusi PDRB sub sektor Perkebunan (Rp. M)				6,213.63	6,610.25	7,463.08	7,500.92	8,188.93	6.177,8	6.942,4	6.945,3	7.547,4	8.569,6	99.42%	105.02 %	93.06%	100.62%	104.65%
					5,066.21	5,389.59	5,710.08	5,530.90	5,920.74	5.037,0	5.311,7	5.121,2	5.456,9	5.787,8	99.42%	98.55%	89.69%	98.66%	97.75%
2.	Produksi Tanaman Perkebunan																		
	Kakao				85,000	86,700	88,434	90,203	92,007			82,529	73,297	71,787			93.3%	81.3%	78.0%
	Kopi Arabika				1,200	1,236	1,261	1,299	1,337			1,168	1,202	1,257			92.6%	92.6%	94.0%
	Kopi Robusta				2,100	2,163	2,206	2,272	2,341			1,983	2,106	1,942			89.9%	92.7%	83.0%
	Kelapa Sawit (rakyat)				350,000	360,500	367,710	378,741	390,104			232,422	258,503	261,801			63.2%	68.3%	67.1%
	Kelapa Dalam				34,700	35,741	36,456	37,549	38,676			33,387	33,160	33,361			91.6%	88.3%	86.3%
3.	Produktivitas																		
	Kakao				925	925	950	950	950	875	808,66	810	793	793	94.59	87.42	85.26	83.47	83.47
	Kopi Robusta				800	800	800	825	850	682	499,50	656	654	762	85.25	62.44	82.00	79.27	89.65
	Kopi Arabika				700	750	800	850	900	583	487,94	874	726	1,033	83.29	65.06	109.25	85.41	114.78
	Kelapa Sawit (rakyat)				4,000	20,000	4,000	4,000	4,000	3,689	18.457,10	3,363	3,085	3,134	92.23	92.29	84.08	77.13	78.35
	Kelapa Dalam				1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,127	1,034	1,073	1,090	1,111	86.69	79.54	82.54	83.85	85.46
4.	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP R)				113	114	115	116	117	111,56	112,15	115,16	113,92	120,55	99.2%	98.4%	100.1%	98.2%	102.2%



Berdasarkan Tabel 2-5 dapat diketahui kinerja pada periode yang lalu dapat dikategorikan cukup baik tapi belum optimal. Indikator kinerja kontribusi PDRB sub sektor perkebunan menunjukkan capaian diantara 89% -99%. Capaian ini tidak dalam trend yang terus naik tetapi fluktuatif. Capaian kinerja indikator peningkatan produksi juga menunjukkan kinerja yang juga fluktuatif. Komoditi kakao yang berkontribusi cukup besar dan mencakup jumlah petani yang banyak bahkan mengalami persentasi capaian yang terus turun atau tumbuh negatif. Kelapa sawit sebagai komoditi terbesar kedua setelah kakao, malah masih menunjukkan capaian target produksi dikisaran 60% – 80%.

Pertumbuhan produksi termasuk peningkatan produktivitas pada komoditi unggulan perkebunan banyak dipengaruhi oleh populasi tanaman tua, tidak optimalnya input pada tanaman menghasilkan serta adanya alih komoditi dan pekebun yang tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan berkebun, melainkan juga bekerja pada sektor lain. Alih komoditi, sekalipun diantara komoditi perkebunan tetapi membutuhkan waktu tahunan baru mulai berproduksi. Sebaliknya, eskalasi permasalahan yang makin kompleks berbanding terbalik dengan kemampuan penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Intervensi yang dilakukan dalam menangani berbagai permasalahan tersebut jangkauannya makin menurun, seiring dengan alokasi yang makin terbatas.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

II.4.1 Tantangan

Tantangan dalam implementasi pembangunan dalam kurun waktu lima tahun mendatang bagi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, adalah:

- a. Perwujudan integrasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan baik lintas sektor maupun lintas wilayah;
- b. Globalisasi dan liberalisasi pasar menuntut pemberian fasilitasi dalam mendukung peningkatan produksi perkebunan lokal dan daya saing agar bisa menembus pasar global;

- c. Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi, dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk perkebunan;
- d. Peningkatan produksi dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman produksi perkebunan;
- e. Tantangan untuk menghasilkan mutu produksi/produk olahan hasil perkebunan yang terstandarisasi baik teknis proses produksi maupun penanganan produk akhir, yang memenuhi standar pertanian berkelanjutan;
- f. Penguatan kelembagaan petani, dan pembangunan kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha;
- g. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani dalam pengembangan pembangunan perkebunan;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang menjadi penunjang dalam peningkatan pembangunan perkebunan.
- i. Pengawasan terhadap peredaran benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan;

II.4.2 Peluang

Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi implementasi pembangunan dalam kurun waktu lima tahun mendatang bagi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, adalah:

- a. Globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang memberikan kemudahan dan peluang dalam promosi produk lokal untuk masuk ke pasar internasional;
- b. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, untuk mendorong mengembangkan usaha yang lebih produktif, efektif dan efisien, serta pembangunan dan pengembangan jejaring pemasaran;
- c. Terbukanya kesempatan dalam peningkatan kelembagaan petani, peningkatan nilai tawar produk, mempercepat penyerapan teknologi dan mempermudah pengendalian ponilah rendah la usaha tani;
- d. Berkembangnya teknologi dalam penyiapan/penyediaan benih unggul bersertifikat yang tahan terhadap hama penyakit, serta dapat meningkatkan produktifitas;



- e. Dukungan fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah;
- f. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan mikro, sehingga memungkinkan pengembangan IMKM/UKM;
- g. Penerapan sistem pengawasan mutu hasil perkebunan untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pangan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Sulawesi Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah: a) masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; b) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; c) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; d) belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya;

Masalah kapasitas sumberdaya manusia (SDM), sarana perkantoran dan kelembagaan dinas (Disbun) merupakan masalah yang umum di daerah yang baru, seperti Sulbar, baik di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten. Persoalan ini berimplikasi pada kinerja Disbun secara keseluruhan. Ini merupakan masalah mendasar yang perlu segera ditangani.

Selain permasalahan internal dalam lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di atas, juga dirasakan Kebijakan Pemprov-Pemkab yang tidak sinkron, kurang terkoordinasi dan kapasitas yang rendah. Masing-masing menilai sering terjadi ketidak-sinkronan program dan kegiatan antara mereka, bahkan sering



tidak terkoordinir, karena satu dan lain penyebab. Juga terungkap bahwa, kapasitas Disbun Provinsi dan Kabupaten tidak mencukupi atau tidak sepadan dengan permasalahan yang dihadapi yang begitu besar dan dinamis. Ini tentu mengganggu kinerja Disbun Provinsi dan Kabupaten serta merugikan masyarakat.

Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Sulawesi Barat belum memiliki peta permasalahan di sektor perkebunan yang dipetakan secara spasial, kuantitatif dan sesuai dengan urgensinya. Permasalahan yang teridentifikasi hanya bersifat kuantitatif dan tidak terpetakan. Misalnya, sulit untuk mendapatkan data spasial dan akurat terkait kebutuhan peremajaan masing-masing komoditas perkebunan. Demikian juga dengan data-data lain, seperti yang terkait dengan praktik pemupukan dan kebutuhan pupuk, hama dan penyakit tanaman, penurunan produktifitas dan mutu produk, pemasaran hasil, kelembagaan, kebutuhan infrastruktur dan berbagai hal lain. Karena permasalahan belum terpetakan dengan baik, sulit untuk membuat perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang tepat, sesuai kebutuhan berdimensi spasial dan waktu serta terintegrasi dengan sektor-sektor lain.

Walaupun belum berbasis spasial, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dan mencapai tujuan dan sasaran dinas serta berkontribusi pada pencapaian target RPD telah dilakukan. Hasil identifikasinya sebagai berikut:

Tabel 3-1. Pemetaan Permasalahan berdasarkan faktor yang mempengaruhi untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Masalah	Akar Masalah	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
Penurunan Produksi dan produktivitas Komoditi Unggulan (kakao, kopi dan kelapa dalam)	Populasi tanaman tidak produktif, tua, rusak berat semakin bertambah di wilayah Sulawesi Barat	Terbatasnya kapasitas sumber daya (SDM, sumber benih dan anggaran) untuk melaksanakan, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi tanaman	Kondisi alam, kurang fokusnya petani mengelola, dan regulasi perbenihan
	Prasarana dan sarana produksi belum memadai	Terbatasnya alokasi penganggaran penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung sub sektor perkebunan (fokus	Minimnya investasi stakeholder/pelaku usaha perkebunan dalam penyediaan prasarana dan



Masalah	Akar Masalah	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
		ke tanaman pangan)	sarana perkebunan
		Terbatasnya pengawasan peredaran pupuk, pestisida, dan alsintan	Terbatasnya KP3, PPNS, aparat yang berwenang
	Ketersediaan/ sertifikasi benih unggul di wilayah Sulawesi Barat belum memadai.	Terbatasnya penangkar benih	Introduksi bahan tanaman komoditi unggulan perkebunan
		Belum tersedianya tenaga pengawas benih tanaman	
		Kurangnya pengawasan peredaran benih	
	Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	Tingginya variasi serangan OPT	
	Luasan lahan komoditi perkebunan berkurang	Terjadinya alih komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan kawasan perkotaan
		Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan	Dampak sosial
	Petani pekebun kurang produktif	Regenerasi petani perkebunan	
	Jumlah dan kapasitas SDM petugas/petani/ pelaku perkebunan masih rendah	Terbatasnya pengawas benih tanaman (PBT)	Rekrutmen petugas perkebunan
		Terbatasnya jumlah penyuluh perkebunan	
		Terbatasnya brigade dan POPT	
		Terbatasnya petugas teknis perkebunan	
	Kelembagaan petani masih lemah	Kurangnya manajemen kelompok tani	Kurangnya akses permodalan
			Kurangnya akses sarana produksi, dan informasi pasar
			Kurangnya kemitraan dengan pelaku usaha perkebunan
Konflik/gangguan usaha perkebunan	Penyerobatan lahan perkebunan	Penyerobatan lahan perkebunan dan dampak perubahan iklim (lamina dan elnino)	
Penurunan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan	Penerapan teknologi inovasi perkebunan	Kurangnya Informasi Teknologi Pengembangan Komoditi Perkebunan	
		Integrasi Komoditi Perkebunan dengan Komoditi Lain	Pelatihan / Peningkatan Keterampilan Kelompok Tani



Masalah	Akar Masalah	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
	Sarana pengolahan hasil perkebunan	Terbatasnya Unit Pengolahan Hasil	Pelatihan / Peningkatan Keterampilan Kelompok Tani
	Kurangnya penanganan pasca panen komoditi perkebunan	Terbatasnya Unit Penanganan Pasca Panen komoditi Perkebunan	Pelatihan / Peningkatan Keterampilan Kelompok Tani
Penurunan daya saing hasil komoditi perkebunan unggulan	Penerapan regulasi/legalitas usaha perkebunan	Kurangnya Pemahaman Pelaku Perkebunan Terhadap Aturan yang Ada	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan yang Ada
			Terbatasnya Perizinan Pelaku Usaha Perkebunan
	Rendahnya penerapan standarisasi mutu global (<i>Good Agriculture Practices, Good Handling Practices, Good Manufacture Practices</i>) komoditi unggulan perkebunan	Kurangnya Penerapan SNI Komoditi Perkebunan Permentasi Kakao, ISPO	Sertifikat yang berskala Global
		Kurangnya Penerapan Pembinaan Penerapan Standart Mutu	
	Akses pemasaran hasil komoditi perkebunan	Akses Kemitraan dengan Pelaku Usaha Perkebunan	Penetapan Harga Komoditi Perkebunan

1) Penurunan Produksi dan Produktifitas Komoditi Unggulan Daerah

Sulawesi Barat salah satu provinsi yang berkontribusi signifikan bagi produksi kakao nasional. dan telah memperoleh berbagai dukungan pemerintah nasional dalam upaya peningkatan dan stabilitas produksinya. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produktifitas kakao dalam provinsi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Konversi lahan dan penurunan produktifitas tanaman yang telah tua kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab menurunan produktifitas ini.

Penurunan produktifitas dan mutu merupakan isu umum yang ditemukan di seluruh kabupaten di Sulbar, terutama untuk komoditas kakao (komoditas yang merupakan unggulan pertama di semua kabupaten) dan kelapa (komoditas unggulan kedua sesudah kakao, kecuali di Mamasa). Penurunan produktifitas dan mutu yang



paling signifikan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir terjadi pada sektor perkebunan kakao. Ini menyebabkan penurunan produktifitas rata-rata antara 50 hingga 100 %, tergantung lokasinya dan penyebab kerugiannya, sehingga kerugian yang ditimbulkannya bernilai trilyunan rupiah setiap tahun.

Penyebab penurunan produktifitas dan mutu yang teridentifikasi meliputi:

- Tanaman tua (terutama untuk kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta sebagian sawit di Kabupaten Pasangkayu);
- Tingginya tingkat serangan hama dan penyakit
- Sumber benih (klon) yang digunakan tidak jelas, khususnya kakao;
- Sistem produksi dan pengelolaan yang tidak tepat (misalnya tanpa pelindung untuk tanaman kakao, tanpa pemupukan yang benar untuk semua komoditas perkebunan rakyat);
- Saprodi, terutama pupuk, yang tidak tersedia atau bahkan tidak digunakan;
- Penelantaran kebun (misalnya karena rumah jauh dari kebun atau punya usaha atau bisnis lain);
- Banjir dan dampak perubahan iklim;

Sedangkan sulitnya melakukan peningkatan produksi karena beberapa masalah di aspek petani dan kelembagaannya serta dukungan penyuluhan, diuraikan sebagai berikut:

2) Kapasitas Petani dan Kelembagaannya yang Rendah

Kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan attitude) petani dan kelembagaannya umumnya (hampir semuanya) tergolong rendah, terutama untuk menghadapi tantangan yang semakin besar, kompleks dan dinamis. Kelemahan ini lebih diperparah oleh kurangnya tenaga pendamping, terlebih yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Masalah ini merupakan penyebab utama proses alih teknologi berjalan lambat atau bahkan tidak berhasil. Lebih-lebih lagi, sangat sulit untuk mengharapkan petani untuk kreatif dan tangguh dalam menghadapi dinamika persoalan dan tantangan. Karena itu, permasalahan ini mutlak perlu diatasi dan mendapatkan prioritas tinggi dalam program pemerintah, dituangkan dalam Renstra.



3) Akses dan Kerjasama Poktan – Koperasi dengan Lembaga Keuangan belum Terbangun

Sektor perkebunan merupakan primadona di Sulbar, tetapi penanganan untuk perbaikan aspek keuangan nyaris tidak mendapatkan perhatian, mulai dari bagaimana petani mengelola keuangan untuk kepentingan produksi yang rutin hingga ke bagaimana menjalankan dan memperbaiki kinerja bisnis mereka. Petani tidak terdidik untuk menjalankan usahatani sebagai bisnis dan bagaimana mengakses bantuan keuangan. Padahal, sering dikeluhkan bahwa, mereka tidak punya modal usaha dan tidak punya akses ke lembaga bantuan keuangan, walaupun yang sering terjadi adalah mereka tidak bisa mengelola keuangan rumahtangga dengan baik, dan mereka tidak paham bagaimana cara mendapatkan bantuan keuangan melalui skim-skim yang ada, misalnya Koperindag, KUR, PNM, dan lain-lain.

Salah satu pangkal dari persoalan ini adalah para petani tidak mau dan tidak terbiasa bekerja berkelompok dan melembaga. Banyak kelompok tani yang terdaftar, tetapi yang aktif dan produktif sangat kurang. Masalah yang sama juga ditemukan dengan koperasi.

Ini merupakan isu besar yang sesungguhnya sudah eksis sejak lama dan pengaruhnya sangat besar. Karena itu perlu penanganan serius yang terprogram melibatkan Disbun dan SKPD atau stakeholders lain, seperti BPD.

4) Tenaga serta Sistem Penyuluhan dan Pendampingan yang belum Mendukung

Bila dilihat dari luas areal perkebunan, besarnya persoalan yang dihadapi yang perlu ditangani melalui sistem pendampingan, maka sangat jelas bahwa Sulbar kekurangan tenaga penyuluh dan pendamping, terlebih yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. Masalah ini dikeluhkan oleh aparat dan stakeholders di semua kabupaten. Bahkan, trend yang terjadi adalah tenaga penyuluh terus berkurang selain karena pensiun, juga karena banyak di antara mereka menjadi pejabat struktural di daerah, sementara rekrutmen baru tidak ada. Minat dan semangat menjadi penyuluh atau tenaga pendamping juga merosot. Sejumlah tenaga pendamping non-PNS yang diangkat (misalnya melalui Gernas Kakao) juga tidak memiliki kapasitas yang



mendukung. Mereka juga bekerja tidak terprogram, tidak terpadu, tidak terkoordinasi, dan sering tidak pernah dimonitor dan dievaluasi baik berdasarkan program yang dibuat. Karena itu, masalah ini merupakan isu strategis dengan prioritas tinggi untuk ditangani.

5) Nilai Tambah dalam Proses Produksi hingga Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Semua tanaman perkebunan, termasuk kebun plasma sawit, tidak diusahakan dengan optimalisasi nilai tambah. Selama puluhan tahun, semua komoditas perkebunan, termasuk kelapa dan kopi (keduanya merupakan tanaman perkebunan tertua di Sulbar), hanya diusahakan tanpa usaha untuk mendapatkan nilai tambah, baik selama proses produksi di on farm (kebun) maupun di pasca panen, pemasaran dan pengolahan (processing). Ini artinya, petani tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahatani dan bisnis perkebunan mereka. Petani sejak dulu hanya mengandalkan penjualan bahan baku asalan dari hasil panen mereka.

Nilai tambah dapat diperoleh, misalnya melalui integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, penghematan (optimalisasi dan efisiensi) penggunaan SAPRODI, penanganan pasca panen, sistem penjualan dan pengolahan hasil. Dalam banyak hal, petani sendiri tidak banyak bisa berbuat untuk mendapatkan nilai tambah ini, karena (misalnya) keterbatasan pengetahuan, modal dan akses pasar yang tepat bila produk yang dihasilkan telah mendapatkan nilai tambah, misalnya karena kakao telah difermentasi. Aspek ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dan terprogram oleh Disbun dan SKPD lain yang terkait.

6) Sistem Pemasaran Komoditas Perkebunan belum Kompetitif

Hampir semua komoditas perkebunan rakyat di Sulbar masih dipasarkan secara individual (sangat jarang dipasarkan secara berkelompok). Bahkan, banyak petani yang terikat pada “punggawa” (nama lain dari “tengkulak”). Di kebanyakan tempat, tidak ada kemitraan berbasis bisnis yang kompetitif antara kelompok tani atau koperasi. Kemitraan hanya ada di lokasi-lokasi tertentu, itupun belum lama



berkembang. Informasi pasar bagi petani juga masih lemah. Ini diperparah oleh masalah infrastruktur (aksesibilitas) yang sudah disebutkan sebelumnya.

Padahal, sesungguhnya posisi tawar petani (dan kelompok tani) dan peluang untuk memperbaiki masalah ini begitu besar, karena produk-produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang besar di pasar global. Ini merupakan tantangan besar bagi Disbun, Disperindag, Diskop dan BUMD. Keberhasilan mengatasi persoalan ini bisa memberikan keuntungan yang besar bagi petani dan Sulbar, dan akan mendorong pembelajaran bisnis bagi petani.

Selain dua masalah mendasar yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan sebagaimana pada Tabel 3-1, permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan ataupun pengendalian.

Keberadaan Komoditas Perkebunan dalam Kawasan Hutan; Tidak ada angka yang pasti yang bisa diperoleh, namun lahan-lahan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan di semua kabupaten di Sulbar cukup luas. Sebagian besar dari kebun-kebun milik rakyat ini telah diusahakan selama puluhan tahun. Bahkan di daerah tertentu, seperti di Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, mayoritas kebun kakao, cengkeh dan kopi berada di kawasan hutan. Terdapat indikasi bahwa, pembukaan lahan kawasan hutan ini masih terus berlangsung, karena memang, pembukaan kebun-kebun rakyat yang dibuka secara individu lebih sulit pengendaliannya. Ini mempunyai permasalahan di dua sisi, yaitu sisi kepastian hukum hak pengusahaan atas tanah oleh petani dan berbagai konsekwensinya, serta sisi penyelamatan lingkungan bila berada pada daerah beresiko longsor dan erosi yang tinggi ataa merupakan kawasan penyangga tata air dan flora-fauna. Karenanya, aspek ini merupakan isu strategis yang perlu segera ditangani.

Degradasi Lingkungan; Degradasi lingkungan dalam kawasan kebun juga merupakan fenomena umum. Penyebab utamanya adalah:

- Erosi tanah (terutama di kebun-kebun pada daerah bertopografi gunung);
- Tanah semakin lama semakin miskin hara, karena tidak ada keseimbangan antara suplai dan pengambilan hara (umumnya petani tidak memupuk atau tidak memupuk secara cukup);



- Petani cenderung beralih ke mono kultur, sehingga biodiversitas ekologi kebun berkurang yang selanjutnya bisa menyebabkan eksplosi hama dan penyakit; dan
- Penggunaan pestisida, fungisida dan herbisida yang berlebihan dan tak sesuai, sehingga mengganggu keseimbangan ekologis yang justru bisa menyebabkan eksplosi dan resistensi hama dan penyakit.

Degradasi lingkungan ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian dalam lingkungan kebun yang menyebabkan penurunan produktifitas dan mutu hasil, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, seperti erosi, longsor dan banjir. (Sulbar merupakan salah satu daerah rawan longsor dan juga gempa). Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kepentingan pengelolaan lingkungan adalah sangat rendah. Lebih-lebih lagi, kebutuhan dan tuntutan dunia terhadap sustainabilitas dan sertifikasi produk semakin mengemuka. Kakao dan hasil olahannya merupakan komoditas global, sehingga tuntutan dunia merupakan alasan lain bahwa degradasi lingkungan dan pengelolaan lingkungan menjadi salah satu isu strategis. Karena itu, masalah degradasi lingkungan perlu mendapatkan prioritas untuk ditanggulangi.

Konversi lahan perkebunan menjadi lahan atau kawasan non-perkebunan berlangsung secara cukup luas, terutama dari kakao ke sawit, kelapa ke sawit, dan lahan perkebunan ke permukiman atau pertambangan. Konversi ini mempunyai konsekuensi ekonomis, ekologis, tata ruang, dan lain-lain yang sering tidak langsung nampak. Arahnya bisa ke kondisi yang lebih baik, tetapi bisa juga sebaliknya, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pemikiran dan pengelolaan yang tepat untuk mengarahkan agar perubahan yang terjadi mengarah ke kondisi dan pencapaian yang lebih baik. Masalah ini bersifat lintas sektoral, bukan hanya merupakan ranah Disbun.

Tuntutan Sustainabilitas, Keamanan bagi Kesehatan & Penyelamatan Lingkungan; Sustainabilitas (keberlanjutan) mengandung makna sistem produksi yang berlanjut. Ini hanya mungkin dicapai bila apa yang dilakukan itu (dalam sistem produksi) memberikan manfaat berupa keuntungan yang layak, sejalan dengan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan, mendukung dan sejalan dengan kehidupan sosial masyarakat, aman bagi kesehatan konsumen produk – produk perkebunan



(misalnya coklat, kopi dan sawit) yang dihasilkan yang rantainya sangat panjang, hingga ke manca negara. Artinya, isu sustainabilitas dinilai dalam spektrum yang luas, dari level on farm (kepentingan petani dan wilayah di Sulbar) hingga ke level off farm di dalam dan luar negeri.

Contoh dari isu sustainabilitas yang penting di sektor perkebunan Sulbar adalah penggunaan dan penanganan bahan-bahan beracun (pestisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain), erosi, pengrusakan hutan, pertanaman di daerah berlereng yang melebihi kelas lereng yang aman, dan sebagainya. Konsumer coklat (misalnya) di manapun, terlebih di negara maju, mempunyai kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan kesehatan petani dan daerah dimana kakao dihasilkan, sekaligus juga terhadap kesehatan mereka sendiri di negara atau daerah mereka, bila mengonsumsi coklat. Kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan ini semakin besar dalam tahun-tahun terakhir, sehingga menjadi salah satu persyaratan bagi suatu produk bisa dijual di negara mereka. Isu ini berpotensi menjadi kendala besar bagi ekspor komoditas perkebunan kita bila isu sustainabilitas ini tidak segera mendapat perhatian.

Infrastruktur belum memadai; Sebagai provinsi yang masih muda, infrastruktur merupakan salah kendala pokok di Sulbar, sehingga mempengaruhi banyak sektor, termasuk perkebunan. Infrastruktur dimaksud berupa infrastruktur utama (jalan negara dan jalan provinsi) maupun jalan akses ke sentra-sentra produksi. Selain jalan, infrastruktur telekomunikasi juga belum optimal mendukung. Kondisi infrastruktur yang kurang atau belum mendukung mempengaruhi harga komoditas di tingkat petani (harga yang diterima petani), posisi tawar dan daya saing, maupun penyediaan SAPRODI. Karena infrastruktur tidak masuk dalam wilayah kerja Disbun, penanganan masalah ini perlu sinkronisasi perencanaan dengan sektor-sektor terkait, misalnya dengan BAPPEDA dan Pekerjaan Umum. Apa yang dirumuskan dalam RENSTRA Perkebunan ini perlu dikomunikasikan dan disinkronkan dengan OPD lain yang terkait.



7) Prioritasi Komoditas Unggulan Perkebunan Sulbar

Berdasarkan penelusuran data, misalnya BPS dan data Disbun, dan sesuai penyampaian para peserta focused group discussion (FGD) yang mewakili berbagai *stakeholders* di semua kabupaten di Sulbar, terungkap bahwa komoditas unggulan perkebunan Sulbar (secara berturut-turut dengan urutan kepentingan) sebagai berikut:

- Kabupaten Polman: kakao dan kelapa sebagai tanaman utama (primer), disusul kopi, lada, kemiri, aren, mete dan sagu sebagai komoditas sekunder;
- Kabupaten Mamuju: kakao, kelapa dan sawit sebagai tanaman primer, disusul tanaman-tanaman perkebunan lainnya sebagai komoditas sekunder;
- Kabupaten Majene: kakao, kelapa dan kopi sebagai tanaman primer, disusul kemiri dan mete sebagai komoditas sekunder;
- Kabupaten Mamasa: kopi dan kakao sebagai tanaman primer, disusul seong dan vanili sebagai tanaman sekunder; serta
- Kabupaten Pasangkayu: sawit, kakao, dan kelapa dalam sebagai tanaman primer, disusul lada, vanili dan pala sebagai tanaman sekunder.
- Kabupaten Mamuju Tengah: sawit, kakao, dan kelapa dalam sebagai tanaman primer, disusul lada, vanili dan pala sebagai tanaman sekunder.

Terungkap bahwa, komoditas unggulan perkebunan di Sulbar di semua kabupaten mempunyai banyak kesamaan. Kakao adalah merupakan komoditas unggulan teratas, sementara kelapa menempati posisi terpenting kedua, kecuali di Mamasa dan Pasangkayu. Di Pasangkayu, meskipun menempati urutan ketiga, kelapa bersaing dengan sawit dalam hal kepentingannya, tetapi arealnya lebih luas dari sawit. Kopi juga merupakan komoditas yang penting selain kakao, kelapa dan sawit. Ringkasnya, ada empat komoditas perkebunan strategis yang mempengaruhi penerimaan dan kehidupan masyarakat di Sulbar, yaitu kakao, kelapa, sawit dan kopi. Di samping komoditas utama (primer), ada juga sejumlah komoditas perkebunan sekunder yang kepentingannya relatif bervariasi antar kabupaten.

Urut-urutan prioritas komoditas unggulan perkebunan seperti itu berimplikasi pada perlunya pemerintah memberi perhatian khusus dalam bentuk kebijakan dan dukungan pendanaan dan lain-lain pada keempat komoditas. Kakao adalah yang



terpenting. Hingga saat ini kebijakan itu telah sejalan, misalnya dengan adanya program "Gerakan Pembaharuan Kakao Sulbar" yang kemudian diperkuat dengan "Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional". Namun, hasil monitoring dan evaluasi di lapangan mengindikasikan secara kuat bahwa apa yang dicapai masih jauh dari yang seharusnya. Karena itu, berbagai hal dan langkah perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di sektor kakao. Dan, karena kelapa, sawit dan kopi adalah juga merupakan komoditas unggulan Sulbar, perhatian dan tindakan untuk perbaikan keragaan ketiga komoditas unggulan non-kakao ini juga perlu diberikan dan dilakukan. Sentuhan yang diberikan pada keempat komoditas unggulan perkebunan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, bahkan secara lintas sektoral, sehingga manfaatnya besar dan berkelanjutan.

Disamping faktor internal di atas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah:

Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi;

Peraturan Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.



III.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Telaah rencana strategis Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan RI Tahun 2020-2024, dilakukan menurut matriks perbandingan sebagai ditunjukkan pada Tabel 3-3. Visi Kementerian Pertanian RI, dalam pembangunan pertanian 2020-2024 adalah: ***“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***

Visi pembangunan perkebunan nasional untuk pembangunan lima tahun mendatang adalah berfokus pada pembangunan pertanian yang berbasis bioindustri. Bioindustri yang dimaksud merupakan jalan yang ditempuh untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar tidak terbarukan, mengoptimalkan nilai tambah dan memperkaya ragam produk turunan. Sehingga pertanian bioindustri hadir sebagai suatu sistem penyelenggaraan perindustrian yang mengoptimalkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian dari industry pertanian atau perkebunan.

Pertanian bioindustri sebagai suatu sistem merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari kebijakan, program, dan kegiatan utama dari rencana strategis kementerian pertanian sebelumnya, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lahan dan lingkungan serta potensi pengetahuan local sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi. Keberagaman atau diversifikasi produk pertanian merupakan langkah untuk menggunakan setiap peluang pasar yang ada, dan untuk mengurangi dampak resiko preferensi pasar yang terus meningkat dan dinamis. Penyediaan produk tersebut tentu tidak lepas dari aspek keamanan, kesehatan dan kehalalan produk. Sehingga akan menghadirkan produk-produk pertanian yang mensejahterakan petani, aman dan meyakinkan bagi konsumen.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian nasional tersebut, maka ditempuh melalui empat misi, yaitu: 1) mewujudkan kedaupatan pangan; 2) mewujudkan sistem pertanian bioindustri; 3) mewujudkan kesejahteraan petani; dan 4) mewujudkan reformasi birokrasi.



Tabel 3-3
Telaah Visi dan Misi Renstra K/L dan Permasalahan Penanganannya di
Tingkat Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Telaah Renstra	Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024	Dirjen Perkebunan Kementan RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
Visi	Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.	Menjadi Direktorat Jenderal yang professional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan perkebunan dan memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan.	Tahapan pembangunan perkebunan di Sulawesi Barat belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan.	Sistem pertanian perkebunan yang berkembang umumnya masih konvensional.	Tuntutan pengembangan bio-industri berkelanjutan dan produksi komoditi perkebunan berkelanjutan dari konsumen dan pasar global meningkat.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kedaulatan pangan; 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; 3. Mewujudkan kesejahteraan petani; 4. Mewujudkan reformasi birokrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan; 2. Mewujudkan untegrasi antara pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan 	Kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang terbatas dalam mendukung peningkatan produksi/ produktifitas, peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah utamanya pada komoditi perkebunan unggulan.	Rendahnya kapasitas petani dan kesadaran yang masih rendah akan pengelolaan usahatani perkebunan yang memenuhi standar berkelanjutan.	



Telaah Renstra	Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024	Dirjen Perkebunan Kementan RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		dengan pendekatan kawasan; 3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan; 4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani; 5. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan 6. Menyediakan fasilitas bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik			



Telaah Renstra	Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024	Dirjen Perkebunan Kementan RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		perkebunan; 7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan; 8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan; 9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.			

Untuk telaah rencana strategis Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan RI Tahun 2020-2024, dilakukan menurut matriks perbandingan sebagai mana ditunjukkan pada Tabel 3-3.

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kajian Lingkungan Strategis

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, pada Pasal 3 dinyatakan Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan,



mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan.

Sebagai koridor pertimbangan utama dalam pengembangan perkebunan dalam konteks ruang wilayah pembangunan, maka kebijakan pembangunan perkebunan mengacu pada Pasal 4 ayat (2), yang memuat tentang strategi pengembangan penataan ruang sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju)–Tampapadang-Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
- b. Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata;
- c. Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras;
- d. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKNp, PKW, PKWp dan PKL;

Kebijakan penataan ruang wilayah guna mewujudkan penataan ruang untuk peningkatan sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 6, yaitu dilakukan melalui:

- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
- b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
- c. mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif;



- d. mengembangkan jenis hasil pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan daya dukung lahan.

Penjelasan lebih lanjut untuk pola ruang wilayah provinsi, untuk pembangunan perkebunan mengacu pada Pasal 26, bahwa kawasan budidaya untuk pertanian meliputi:

- a. kawasan yang berpotensi budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Majene;
- b. kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan hortikultura di Kabupaten Mamasa;
- c. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu;
- d. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kakao di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- e. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kelapa dalam (kelapa rakyat) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- f. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu;
- g. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- h. kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah;

Untuk pengembangan industry perkebunan, maka yang mejadi acuan adalah pada Pasal 30, tentang kawasan potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industry, yaitu:

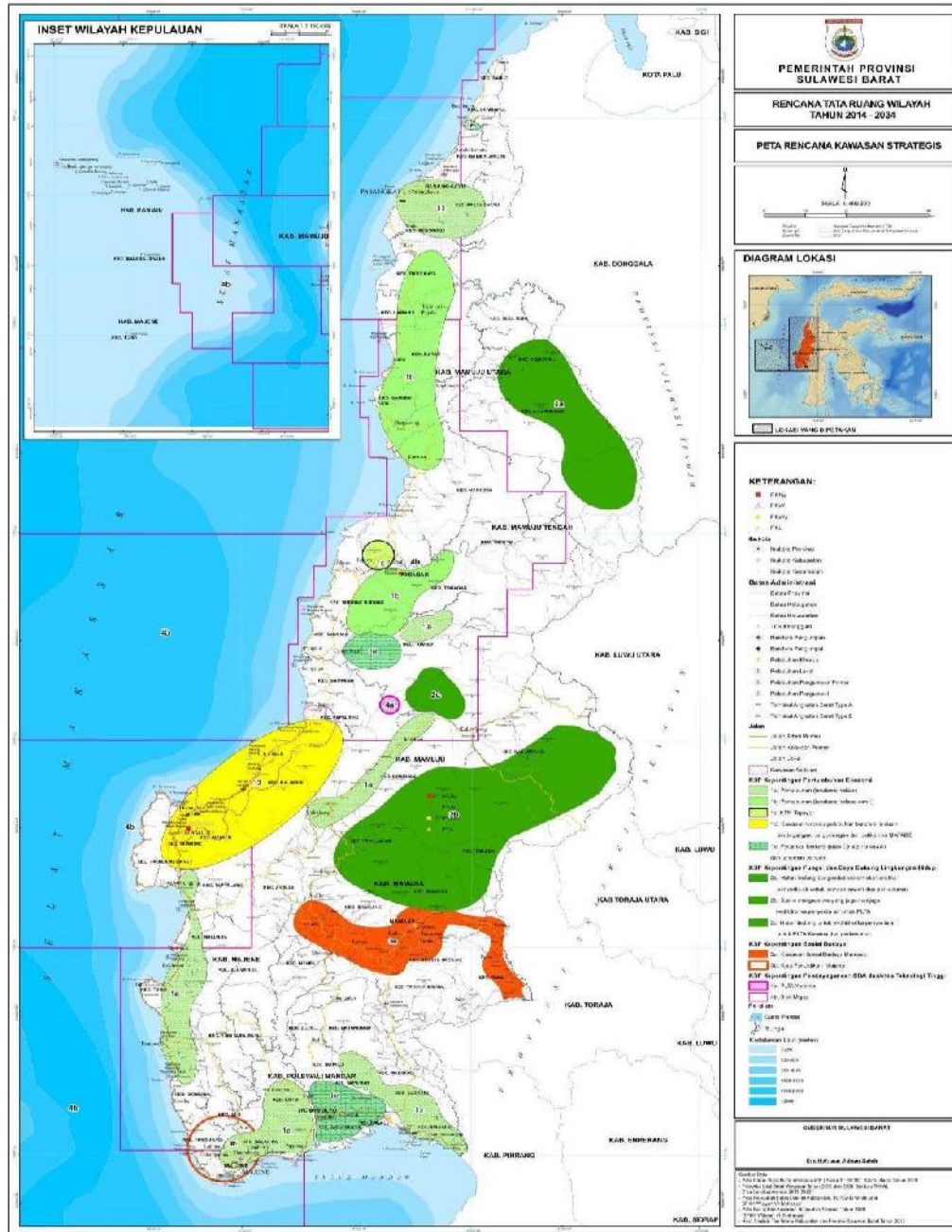


- a. kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan pengembangannya di Belang belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- b. kawasan industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan kakao direncanakan pengembangannya di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
- c. kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju; dan
- d. kawasan industri perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya untuk kawasan strategis ekonomi, dapat dilihat pada Pasal 41, ayat (1) bagian b, bahwa kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju dan perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat; dan bagian c, bahwa kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang-Belang sebagai pusat pengolahan komoditipertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai *outlet* dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulawesi Barat serta wilayah perbatasan provinsi tetangga.



Gambar 3-1 Peta Kawasan Strategis RTRW Prov. Sulawesi Barat 2014-2034



Indikasi program utama yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi, pada sektor pertanian khususnya pada sub-sektor perkebunan adalah:



1. Pembangunan SMK dan Politeknik Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Perindustrian di Kabupaten Mamuju yang akan dinisiasi pada Tahun 2015 dan berlanjut hingga RPJPD II;
2. Pembangunan industri kakao, di kabupaten Mamuju; di inisiasi pada tahun 2014 hingga pada RPJPD II;
3. Pembangunan industri kakao di Kabupaten Polman; antara tahun 2014 – 2024;

III.4 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan perkebunan dan hasil penelaahan kebijakan nasional hingga daerah, sebelum menentukan isu-isu strategis, berikut ini akan dirangkum hasil identifikasi isu-isu menurut dinamika global, nasional dan regional.

Tabel 3-4 Hasil Identifikasi Isu-Isu Strategis menurut Dinamika Global, Nasional, dan Regional

Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk dunia semakin pesat namun disaat yang sama lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan; 2. Khususnya pada produk kakao, secara global sedang mengalami penurunan produksi, hal ini menyebabkan tingginya nilai jual harga kakao dunia; 3. Keadaan ekonomi dunia belakangan ini sedang bergejolak dan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas harga pangan dalam negeri; 4. Isu perbukhuna iklim global; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kecenderungan kenaikan komoditi perkebunan khususnya cengkeh dan kakao dalam lima tahun terakhir. Keadaan ini dapat berdampak positif bagi kesejahteraan petani, namun juga dapat mempengaruhi keputusan petani untuk mengganti jenis tanaman yang mereka sedang budidayakan dengan dengan komoditi yang lebih mahal; 2. Agenda prioritas pembangunan kawasan timur Indonesia; 3. Pemerataan pembangunan perkakaoan yang akan diimplementasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat koordinasi yang baik antara pihak swasta periindustrian perkebunan dengan pemerintah daerah; 2. Belum optimalnya gerakan nasional kakao di daerah-daerah sentra kakao; 3. Munculnya institusi-institusi kelompok tani yang mengembangkan sistem integrasi perkebunan-ternak; 4. Penurunan produksi komoditi perkebunan; 5. Tidak adanya peta kawasan perkebunan yang secara legal dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan perencanaan



Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
<p>5. Terjadinya Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</p> <p>6. Pergolakan peperangan antara Ukraina dan Rusia</p>	<p>keadaalam kebijakan anggaran;</p> <p>4. Pembangunan agroindustri, termasuk perkebunan, yang berbasis kawasan ;</p> <p>5. Pengembangan bahan bakar nabati dama sistem pertanian bio-industri;</p> <p>6. Lemahnya kelembagaan pertain yang menempatkan petani selalu berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek;</p> <p>7. Belum adanya upaya program/kegiatan yang secara nyata mepengaruhi produktifitas lahan perkebunan;</p> <p>8. Kebijakan sumber bibit, penggunaan bibit, dan sertifikasi bibit yang terkesan mematikan usaha pembibitan kakao pada kelompok tani;</p> <p>9. Peningkatan infrastruktur pelabuhan secara nasional yang akan sangat membantu dalam pemasaran dan distribusi produk dan saprodi pertanian;</p> <p>10. Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur;</p> <p>11. Harga TBS yang tidak menentu akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO</p>	<p>pengembangan wilayah perkebunan;</p> <p>6. Kesejahteraan petani menurut indikator makro mengalami peningkatan, namun secara mikro kondisi perkebbunan belum dapat secara nyata mendorong kesejahteraan rumah tangga petani;</p> <p>7. Dinamika politik yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah, dan pelayanan pemerintah;</p> <p>8. Keterbatasan inftastruktur transportasi di areal perkebunan sehigga mempengaruhi aksesibilitas lahan perkebunan;</p> <p>9. Minimnya pelaku investasi sub-sektor perkebunan dalam daerah;</p> <p>10. Perhitungan kontribusi sub-sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah kurang disadari oleh kebanyakan stakeholder perkebunan dalam daerah.</p>



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Sulawesi Barat

Perumusan tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah dan mengatasi permasalahan serta merespon isu strategi yang sedang dihadapi, maka tujuan menjadi hal terpenting yang harus dirumuskan. Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan target yang ditetapkan.

Untuk menghasilkan pernyataan tujuan yang searah dengan sasaran dan indikator maka berikut akan disajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tabel 4-1 memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja beserta penjelasan dari Indikator, dan Target Kinerja Sasaran dari tahun 2023 hingga 2026 mendatang.

Tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 pada halaman 304 dijabarkan bahwa tujuan pertama pembangunan daerah (T1) adalah “meningkatkan kemandirian ekonomi daerah” dengan sasaran pembangunan daerah (SS1) “meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam mendukung perekonomian daerah”. Hal inilah yang akan menjadi acuan oleh Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagai *leading sector* dari pembangunan perkebunan untuk merumuskan kembali tujuan dinas yaitu “meningkatkan kapasitas pengelolaan perkebunan berbasis kawasan perkebunan berkelanjutan yang adaptif inovatif dan transformasi digital” dengan sasaran strategis dinas perkebunan yaitu “meningkatkan produksi hasil komoditas perkebunan, meningkatkan kualitas hasil, pemberdayaan, dan penguatan sumber daya perkebunan berkelanjutan”.

Kemandirian ekonomi daerah mutlak diperlukan untuk menuju masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi. Ketiga kondisi ini sejahtera, maju dan malaqbi dapat terwujud ketika didukung kondisi ekonomi wilayah



yang juga maju. Perekonomian yang terus tumbuh setiap tahunnya. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan dapat meningkatkan pendapatan petani terutama jika diiringi dengan peningkatan mutu dan pemenuhan berbagai standarisasi mutu, sehingga secara tidak langsung kontribusi pembangunan perkebunan terhadap target pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Barat dapat dirasakan.

Berikut uraian tujuan, sasaran dan indikator kinerja beserta target capaiannya hingga Tahun 2026 sebagai berikut (Tabel 4-1).



Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perkebunan Berbasis Kawasan Perkebunan Berkelanjutan yang Adaptif Inovatif dan Transformasi Digital		Kontribusi PDRB Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sulawesi Barat	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit perkebunan (PDRB subsektor perkebunan) dibagi dengan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit produksi yang telah ditetapkan yang ada disulawesi barat dalam jangka waktu tertentu (PDRB Sulawesi Barat) dikali 100 persen 	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	22,29	22,94	23,07	24,15	24,15
	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata peningkatan produksi perkomoditas tanaman perkebunan selama satu tahun (R1) sama dengan produksi perkomoditas tanaman perkebunan (ton) selama satu tahun (n1) dikurang produksi perkomoditas tanaman perkebunan (ton) satu tahun yang lalu (n-1) dibagi produksi perkomoditas tanaman perkebunan (ton) satu tahun yang lalu (n-1) dikali 100 persen. Jumlah keseluruhan rata-rata peningkatan produksi perkomoditas tanaman perkebunan (JR1) dibagi dengan jumlah keseluruhan tanaman perkebunan (S1) x 100 persen 	Hasil Perhitungan dan Analisis Disbun	1,2	2,58	3,9	5,19	5,19
		Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas perkebunan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata peningkatan produktivitas perkomoditas tanaman perkebunan selama satu tahun (R2) sama dengan produktivitas perkomoditas tanaman perkebunan (ton) selama satu tahun (n1) dikurang produktivitas 	Hasil Perhitungan dan Analisis Disbun	0,51	1,06	1,78	2,66	2,66



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
				<p>perkomoditas tanaman perkebunan (ton) satu tahun yang lalu (n-1) dibagi produktivitas perkomoditas tanaman perkebunan (ton) satu tahun yang lalu (n-1) dikali 100 persen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah keseluruhan rata-rata peningkatan produktivitas perkomoditas tanaman perkebunan (JR2) dibagi dengan jumlah keseluruhan tanaman perkebunan (S2) x 100 persen 						
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Harga yang diterima Petani Perkebunan dibagi Indeks Harga yang dikeluarkan Petani Perkebunan dikali 100. 	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	138	138	139	139	139
	Tercapainya Penguatan Manajemen Kinerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks RB	Indeks	<ul style="list-style-type: none"> Nilai evaluasi reformasi birokrasi yang diperoleh dari 8 area perubahan seperti aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur 	Hasil Evaluasi Inspektorat	60	65	70	75	75



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 Strategi

Strategi Renstra Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan atas isu strategis, pokok masalah, masalah dan akar masalah sehingga terbentuk bahan kerangka penyusunan Renstra dari masalah:

- 1) Rendahnya Kapasitas Petani Perkebunan
- 2) Pengelolaan Lahan Perkebunan masih terbatas
- 3) Budidaya komoditas perkebunan yang kurang memperhatikan kesesuaian lahan
- 4) Penggunaan benih perkebunan yang berkualitas masih belum optimal
- 5) Terbatasnya Prasarana Perkebunan
- 6) Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan
- 7) Rendahnya Kualitas Produk Perkebunan
- 8) Produk yang dijual sebagian besar dalam wujud bahan mentah
- 9) Terbatasnya Akses Pemasaran Produk Perkebunan.

Yang dijabarkan dalam Strategi Renstra sebagai berikut:

- 1) Gerakan Sulawesi Barat Kembali Ke Tanaman Kopi, Kakao, dan Kelapa (GS-5K) – Gerbang Kapila (Gerakan Pengembalian Kejayaan Kakao, Kopi dan Kelapa Sulbar)
- 2) Meningkatkan pengendalian penyebaran OPT, DPI dan GUP pada tanaman perkebunan
- 3) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan sarana, prasarana dan pemanfaatan sarana produksi perkebunan yang legal
- 4) Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat
- 5) Desain Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan
- 6) Meningkatkan layanan standarisasi mutu, dan legalitas usaha perkebunan
- 7) Pemenuhan Hilirisasi Komoditas Perkebunan
- 8) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
- 9) Pengembangan Agrowisata Perkebunan
- 10) Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan



- 11) Pengembangan Pendataan CPCL berbasis Digital
- 12) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan keuangan, serta Implementasi reformasi birokrasi berdasarkan roadmap.

V.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan akar permasalahan pada pohon masalah yang meliputi :

- 1) Kurangnya transfer ilmu pengetahuan mengenai budidaya perkebunan
- 2) Pola pikir petani yang masih konvensional
- 3) Kurangnya modal
- 4) Kurang optimalnya kelembagaan petani perkebunan
- 5) Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
- 6) Alih fungsi lahan
- 7) Terbatasnya kepemilikan lahan yang sesuai untuk perkebunan
- 8) Kurangnya pengetahuan mengenai kesesuaian lahan perkebunan
- 9) Kurangnya jumlah penangkar benih perkebunan
- 10) Kurangnya sumber benih perkebunan
- 11) Terbatasnya akses terhadap benih unggul bersertifikat
- 12) Adanya peredaran benih yang kurang dan atau tidak bermutu
- 13) Kurang optimalnya sertifikasi benih perkebunan
- 14) Terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur perkebunan
- 15) Mahalnya harga saprotan
- 16) Kurang optimalnya penerapan PHT
- 17) Adanya serangan hama sekunder (resurgensi)
- 18) Adanya migrasi OPT perkebunan
- 19) Terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan GAP dan GHP
- 20) Terbatasnya sarana pengolahan pasca panen
- 21) Besarnya tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani
- 22) Kurangnya promosi produk perkebunan
- 23) Lemahnya jaringan kelembagaan pemasaran



Akan dijabarkan dalam Arah Kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

- 1) Perluasan dan perbaikan tanaman berbasis kawasan/sentra produksi
- 2) Pengembangan prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan
- 3) Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan
- 4) Pengembangan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan
- 5) Mendorong Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat
- 6) Kerjasama Perguruan Tinggi dalam hal Perencanaan dan Pengembangan Komoditas Strategis Perkebunan
- 7) Menjalin Kemitraan Inovasi Teknologi dan Pemasaran Komoditas Perkebunan
- 8) Penanganan Standarisasi dan Pengawasan Mutu, serta Pembinaan Usaha Perkebunan
- 9) Pengembangan komoditas terindikasi geografis (ig)
- 10) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil
- 11) Peningkatan Penerapan, Penanganan Pascapanen, dan Fasilitasi Pemasaran Komoditas Perkebunan
- 12) Mendorong Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
- 13) Pemenuhan Pengembangan Agrowisata Perkebunan
- 14) Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan
- 15) Tersedianya Database Kelompok Tani berbasis Aplikasi
- 16) Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa

Berikut Struktur keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 secara terinci disajikan dalam Tabel 5.1 di bawah ini:



Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perkebunan Berbasis Kawasan Perkebunan Berkelanjutan yang Adaptif Inovatif dan Transformasi Digital	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	Gerbang Kapila (Gerakan Pengembalian Kejayaan Kakao, Kopi dan Kelapa Sulbar)	Perluasan dan perbaikan tanaman berbasis kawasan/sentra produksi Pengembangan prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan	
		Meningkatkan pengendalian penyebaran OPT, DPI dan GUP pada tanaman perkebunan	Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan	
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan sarana, prasarana dan pemanfaatan sarana produksi perkebunan yang legal	Pengembangan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan	
		Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat	Mendorong Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan	Desain Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan		Kerjasama Perguruan Tinggi dalam hal Perencanaan dan Pengembangan Komoditas Strategis Perkebunan Menjalin Kemitraan Inovasi Teknologi dan Pemasaran Komoditas Perkebunan
			Meningkatkan layanan standarisasi mutu, dan legalitas usaha perkebunan	Penanganan Standarisasi dan Pengawasan Mutu, serta Pembinaan Usaha Perkebunan Pengembangan komoditas terindikasi geografis (ig)
		Pemenuhan Hilirisasi Komoditas Perkebunan		Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil Peningkatan Penerapan, Penanganan Pascapanen, dan Fasilitasi Pemasaran Komoditas Perkebunan
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Mendorong Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
		Pengembangan Agrowisata Perkebunan	Pemenuhan Pengembangan Agrowisata Perkebunan	
		Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan	Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan Pendataan CPCL berbasis Digital	Tersedianya Database Kelompok Tani berbasis Aplikasi
		Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan keuangan, serta Implementasi reformasi birokrasi berdasarkan roadmap	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
	Tercapainya Penguatan Manajemen Kinerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pembinaan dan pemberian dukungan adm. pengelolaan keuangan, dan perencanaan serta Implementasi RB berdasarkan roadmap	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas didetailkan menjadi sejumlah program dan kegiatan. Sejak tahun 2021 nomenklatur Program, Kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada PMD Nomor 90 Tahun 2019, sedangkan penegasan indikator kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021. Berikut rincian Rencana Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:



Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perkebunan Berbasis Kawasan Perkebunan Berkelanjutan yang Adaptif Inovatif dan Transformasi Digital		T1		Kontribusi PDRB Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sulawesi Barat	17,43 persen	17,68 persen		17,78 persen		17,85 persen		17,89 persen		17,89 persen	BPS	Sulbar
	Tercapainya Penguatan Manajemen Kinerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	SS2		Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)	137 poin	138 poin		138 poin		139 poin		139 poin		139 poin	BPS	Sulbar
		3_27_01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	82 poin	82 poin	13.637	82 poin	17.850	82 poin	19.920	82 poin	22.860	82 poin	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Dinas Perkebunan	48 poin	48 poin	580	48 poin	760	48 poin	820	48 poin	880	48 poin	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	190	1 dokumen	240	1 dokumen	260	1 dokumen	280	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	50	1 dokumen	70	1 dokumen	70	1 dokumen	80	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	50	1 dokumen	70	1 dokumen	70	1 dokumen	80	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10	1 dokumen	20	1 dokumen	20	1 dokumen	20	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	30	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_01_06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	130	2 laporan	140	2 laporan	150	2 laporan	Disbun	Sulbar
	3_27_01_1_01_07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	150	2 laporan	190	2 laporan	210	2 laporan	220	2 laporan	Disbun	Sulbar	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_01_1_02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Pengelolaan Anggaran	100 persen	100 persen	9.442	100 persen	12.460	100 persen	14.120	100 persen	16.630	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	85 orang	90 Orang	9.000	95 Orang	11.880	100 Orang	13.500	110 Orang	15.950	110 Orang	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	100 persen	100 persen	100	100 persen	130	100 persen	140	100 persen	150	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi dokumen/laporan keuangan PD diselesaikan	12 dokumen	12 dokumen	88	12 dokumen	110	12 dokumen	120	12 dokumen	130	12 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan OPD yang diselesaikan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	130	3 laporan	140	3 laporan	150	3 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	2 laporan	2 laporan	37	2 laporan	50	2 laporan	50	2 laporan	60	2 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	100 persen	100 persen	50	100 persen	70	100 persen	70	100 persen	80	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun	14 laporan	14 laporan	45	14 laporan	60	14 laporan	70	14 laporan	70	14 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_02_08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	2 laporan	22	2 laporan	30	2 laporan	30	2 laporan	40	2 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 persen	100 persen	360	100 persen	480	100 persen	510	100 persen	550	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_05_01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80 persen	80 persen	60	80 persen	80	80 persen	90	80 persen	90	80 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_05_02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	85 orang	90 Orang	100	90 Orang	130	90 Orang	140	90 Orang	150	90 Orang	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_01_1_05_09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	27 orang	27 orang	100	27 orang	130	27 orang	140	27 orang	150	27 orang	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_05_10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	100 persen	100 persen	50	100 persen	70	100 persen	70	100 persen	80	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_05_11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	100 persen	50	100 persen	70	100 persen	70	100 persen	80	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Lingkup SKPD	95 persen	95 persen	850	95 persen	1.110	95 persen	1.190	95 persen	1.270	95 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	5 jenis	5 jenis	20	5 jenis	30	5 jenis	30	5 jenis	30	5 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	50	5 jenis	70	5 jenis	70	5 jenis	80	5 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disiapkan	12 bulan	12 bulan	10	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 jenis	11 jenis	130	11 jenis	170	11 jenis	180	11 jenis	190	11 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak dan Jumlah Jenis Barang yang digandakan	3 Jenis	3 Jenis	20	3 Jenis	30	3 Jenis	30	3 Jenis	30	3 Jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan dan Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	30	2 Jenis	40	2 Jenis	50	2 Jenis	50	2 Jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	50 jenis	100	50 jenis	130	50 jenis	140	50 jenis	150	50 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_06_09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2 laporan	2 laporan	490	2 laporan	620	2 laporan	670	2 laporan	720	2 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	60 persen	60 persen	1.205	60 persen	1.520	60 persen	1.640	60 persen	1.760	60 persen	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_01_1_07_02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional roda dua dan roda empat yang diadakan	5 unit	5 unit	970	5 unit	1.220	5 unit	1.310	5 unit	1.410	5 unit	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_07_11	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeler yang diadakan	15 jenis	15 jenis	45	15 jenis	60	15 jenis	70	15 jenis	70	15 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_07_11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 jenis	10 jenis	190	10 jenis	240	10 jenis	260	10 jenis	280	10 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran	95 persen	95 persen	1.020	95 persen	1.290	95 persen	1.390	95 persen	1.500	95 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_08_01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang dikelola	100 persen	100 persen	50	100 persen	70	100 persen	70	100 persen	80	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_08_02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang dibayarkan (Rekening Tagihan)	12 rek tag	12 rek tag	120	12 rek tag	150	12 rek tag	170	12 rek tag	180	12 rek tag	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_08_04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 jenis	12 jenis	850	12 jenis	1.070	12 jenis	1.150	12 jenis	1.240	12 jenis	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Masa Layak Pakai Kendaraan Dinas	60 persen	60 persen	180	60 persen	230	60 persen	250	60 persen	270	60 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_01_1_09_02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang menggunakan Jasa Pemeliharaan dan memiliki Pajak/Izin	20 unit	20 unit	180	20 unit	230	20 unit	250	20 unit	270	20 unit	Disbun	Sulbar
	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	SS1		Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan	1,2 persen	1,2 persen	2,58 persen		3,9 persen		5,19 persen		5,19 persen	Disbun	Sulbar	
		3_27_02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana produksi pengembangan kawasan perkebunan	20 persen	25 persen	4.890	20 persen	6.140	20 persen	6.730	25 persen	7.330	90 Persen	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah wilayah pelaksanaan pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian	6 kabupaten	6 kabupaten	490	6 kabupaten	620	6 kabupaten	670	6 kabupaten	720	6 kabupaten	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_01_01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	2 laporan	400	2 laporan	500	2 laporan	540	2 laporan	580	2 laporan	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_02_1_01_02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 dokumen	90	1 dokumen	120	1 dokumen	130	1 dokumen	140	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanam	Jumlah wilayah pelaksanaan pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanam	6 kabupaten	6 kabupaten	3.200	6 kabupaten	4.020	6 kabupaten	4.440	6 kabupaten	4.870	6 kabupaten	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_02_01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	28 sertifikat	28 sertifikat	200	30 sertifikat	270	40 sertifikat	390	50 sertifikat	520	148 sertifikat	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_02_04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 laporan	4 laporan	3.000	4 laporan	3.750	4 laporan	4.050	4 laporan	4.350	4 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Teridentifikasinya sumber daya genetik tanaman perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	1.200	1 Laporan	1.500	1 Laporan	1.620	1 Laporan	1.740	1 Laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_02_1_03_04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1 Laporan	1.200	1 Laporan	1.500	1 Laporan	1.620	1 Laporan	1.740	1 Laporan	Disbun	Sulbar
	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	SS1		Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas perkebunan	0,51 persen	0,51 persen		1,06 persen		1,78 persen		2,66 persen		2,66 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase produksi perkebunan yang memenuhi standar nasional	20 persen	15 persen	12.261	15 persen	15.350	20 persen	16.580	20 persen	17.810	70 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01	Penataan Prasarana Pertanian	Tercapainya penataan prasarana perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	12.261	1 Laporan	15.350	1 Laporan	16.580	1 Laporan	17.810	1 Laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	250	1 Dokumen	320	1 Dokumen	340	1 Dokumen	370	1 Dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.726	1 Dokumen	7.160	1 Dokumen	7.740	1 Dokumen	8.310	1 Dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	3.100	1 Dokumen	3.880	1 Dokumen	4.190	1 Dokumen	4.500	1 Dokumen	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_03_1_01_04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 dokumen	1 dokumen	435	1 dokumen	550	1 dokumen	590	1 dokumen	640	1 dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	2 unit	2 unit	400	2 unit	500	2 unit	540	2 unit	580	2 unit	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	950	12 Laporan	1.190	12 Laporan	1.290	12 Laporan	1.380	12 Laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_03_1_01_10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	2 unit	2 unit	1.400	2 unit	1.750	2 unit	1.890	2 unit	2.030	2 unit	Disbun	Sulbar
	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	SS1		Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan	1,2 persen	1,2 persen		2,58 persen		3,9 persen		5,19 persen		5,19 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	60 persen	60 persen	1.950	60 persen	2.440	60 persen	2.640	60 persen	2.830	60 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_05_1_01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	100 persen	100 persen	1.950	100 persen	2.440	100 persen	2.640	100 persen	2.830	100 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_05_1_01_01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	1.700 ha	1000 ha	1.000	1000 ha	1.250	1000 ha	1.350	1000 ha	1.450	4000 ha	Disbun	Sulbar
		3_27_05_1_01_02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	100 ha	125 ha	350	125 ha	440	125 ha	480	125 ha	510	500 ha	Disbun	Sulbar
		3_27_05_1_01_03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 ha	75 ha	200	75 ha	250	75 ha	270	75 ha	290	300 ha	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
		3_27_05_1_01_04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	125 ha	125 ha	400	125 ha	500	125 ha	540	125 ha	580	500 ha	Disbun	Sulbar
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan	SS2		Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)	137 poin	138 poin		138 poin		139 poin		139 poin		139 poin	BPS	Sulbar
		3_27_06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan legalitas perizinan usaha perkebunan	50 persen	50 persen	270	50 persen	350	50 persen	380	50 persen	400	50 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_06_1_01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan legalitas perizinan usaha perkebunan	90 Persen	90 Persen	270	90 Persen	350	90 Persen	380	90 Persen	400	90 Persen	Disbun	Sulbar
		3_27_06_1_01_01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	130	1 Dokumen	140	1 Dokumen	150	1 Dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_06_1_01_02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten / Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60	1 Dokumen	80	1 Dokumen	90	1 Dokumen	90	1 Dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_06_1_01_03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	110	1 Laporan	140	1 Laporan	150	1 Laporan	160	1 Laporan	Disbun	Sulbar
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan	SS2		Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)	137 poin	138 poin		138 poin		139 poin		139 poin		139 poin	BPS	Sulbar
		3_27_07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penerapan GAP, GHP, dan GMP tanaman perkebunan	35 persen	35 persen	5.557	35 persen	6.970	35 persen	7.880	35 persen	8.460	35 persen	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pengembangan ketenagaan penyuluh yang kompeten	90 Persen	90 Persen	500	90 Persen	630	90 Persen	590	90 Persen	620	90 Persen	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_01_01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	25 orang	350	25 orang	440	25 orang	480	25 orang	510	100 Orang	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_01_02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti	10 Orang	10 Orang	150	10 Orang	190	5 Orang	110	5 Orang	110	30 Orang	Disbun	Sulbar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)	Capaian	Rp (juta)			
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17
			Swasta	Pengembangan Kompetensi												
		3_27_07_1_02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase layanan penyuluhan perkebunan	85 Persen	85 Persen	3.407	85 Persen	4.270	85 Persen	5.040	85 Persen	5.420	85 Persen	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_02_01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	2.450	1 Dokumen	3.070	1 Dokumen	3.310	1 Dokumen	3.560	4 Dokumen	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_02_02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 kelompok	15 Kelompok	957	15 Kelompok	1.200	20 Kelompok	1.730	20 Kelompok	1.860	70 Kelompok	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase tercapainya kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan perkebunan	85 Persen	85 Persen	1.650	85 Persen	2.070	85 Persen	2.250	85 Persen	2.420	85 Persen	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_03_01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	1 unit	1 Unit	180	1 Unit	230	1 Unit	250	1 Unit	270	4 Unit	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_03_02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	1 Laporan	1 Laporan	750	1 Laporan	940	1 Laporan	1.020	1 Laporan	1.090	4 laporan	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_03_03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 unit	1 Unit	360	1 Unit	450	1 Unit	490	1 Unit	530	4 Unit	Disbun	Sulbar
		3_27_07_1_03_04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 unit	2 unit	360	2 unit	450	2 unit	490	2 unit	530	8 Unit	Disbun	Sulbar
		3_	TOTAL				38.565		49.100		54.130		59.690			



BAB VII TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja sebagaimana telah disebutkan dalam Bab IV Renstra ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Secara rinci disajikan pada Tabel 7, sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik target kinerja pada lampiran Renstra ini.

Tabel 7-1.
Pemetaan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

RPD		Indikator
Tujuan	Sasaran	
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perkebunan Berbasis Kawasan Perkebunan Berkelanjutan yang Adaptif Inovatif dan Transformasi Digital		Kontribusi PDRB Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sulawesi Barat
	Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan	Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan
		Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas perkebunan
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)



**Tabel 7-2. Target Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Barat Tahun 2023-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD*	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
Kontribusi PDRB Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sulawesi Barat	Persen	17,43	22,29	22,94	23,07	24,15	24,15
Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan	Persen	1,20	1,20	2,58	3,90	5,19	5,19
Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas perkebunan	Persen	0,51	0,51	1,06	1,78	2,66	2,66
Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)	Poin	137	138	138	139	139	139
Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan:							
- Kakao	Ton	76.275,89	76.984,89	79.064,10	80.416,30	81.717,05	81.717,05
- Kopi	Ton	4.396,04	4.235,79	4.666,10	5.096,42	5.526,73	5.526,73
- Kelapa	Ton	36.753,53	37.199,02	37.412,92	37.562,87	37.649,72	37.649,72
- Kelapa Sawit	Ton	196.935,00	200.800,86	202.106,07	203.419,76	204.741,99	204.741,99
Produksi Komoditi Prospektif Perkebunan							
- Cengkeh	Ton	1.265,93	1.283,90	1.289,94	1.296,00	1.302,09	1.302,09
- Lada	Ton	303,47	311,21	313,82	316,46	319,12	319,12
- Pala	Ton	20,90	21,02	21,06	21,10	21,14	21,14
Produksi Komoditi Potensial Perkebunan							
- Kemiri	Ton	6.301,80	6.482,86	6.544,45	6.606,62	6.669,39	6.669,39
- Kapuk	Ton	35,89	36,74	37,03	37,32	37,61	37,61
- Jambu mete	Ton	116,30	118,91	119,79	120,68	121,57	121,57
- Sagu	Ton	556,20	560,83	562,40	563,97	565,55	565,55
- Nilam	Ton	27,64	27,59	27,63	27,66	27,70	27,70
- Aren	Ton	651,08	655,25	656,49	657,74	658,99	658,99
- Vanili	Ton	19,49	20,06	20,26	20,46	20,66	20,66
Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan:							
- Kakao	Kg/Ha	789,30	794,99	813,94	827,04	837,80	837,80
- Kopi	Kg/Ha	692,81	612,90	604,71	621,34	655,28	655,28
- Kelapa	Kg/Ha	1.116,95	1.122,97	1.124,18	1.121,10	1.117,14	1.117,14
- Kelapa Sawit	Kg/Ha	3.397,13	3.463,82	3.486,33	3.508,99	3.531,80	3.531,80
Produktivitas Komoditi Prospektif Perkebunan							
- Cengkeh	Kg/Ha	707,74	711,82	715,16	718,52	721,90	721,90
- Lada	Kg/Ha	526,04	539,45	543,98	548,55	553,16	553,16
- Pala	Kg/Ha	54,15	54,45	54,56	54,66	54,76	54,76
Produktivitas Komoditi Potensial Perkebunan							
- Kemiri	Kg/Ha	1.268,37	1.304,82	1.317,21	1.329,73	1.342,36	1.342,36
- Kapuk	Kg/Ha	369,43	378,21	381,16	384,14	387,13	387,13
- Jambu mete	Kg/Ha	277,90	284,14	286,24	288,36	290,49	290,49
- Sagu	Kg/Ha	748,88	755,11	757,22	759,34	761,47	761,47
- Nilam	Kg/Ha	65,37	65,25	65,34	65,42	65,51	65,51
- Aren	Kg/Ha	819,34	824,58	826,15	827,72	829,29	829,29
- Vanili	Kg/Ha	129,90	133,76	135,07	136,39	137,73	137,73
Peningkatan Luas Panen Komoditi Unggulan Perkebunan Berkelanjutan							
- Kakao	Ha	96.637,27	96.837,36	97.137,27	97.233,77	97.537,27	97.537,27
- Kopi	Ha	6.345,22	6.911,02	7.716,32	8.202,29	8.434,09	8.434,09
- Kelapa	Ha	32.905,29	33.125,51	33.280,29	33.505,31	33.701,97	33.701,97



Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD*	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
- Kelapa Sawit	Ha	57.971,00	57.971,00	57.971,00	57.971,00	57.971,00	57.971,00
Peningkatan Luas Panen Komoditi Prospektif Perkebunan Berkelanjutan							
- Cengkeh	Ha	1.788,70	1.803,70	1.803,70	1.803,70	1.803,70	1.803,70
- Lada	Ha	576,90	576,90	576,90	576,90	576,90	576,90
- Pala	Ha	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
Peningkat Luas Panen Komoditi Potensial Perkebunan Berkelanjutan							
- Kemiri	Ha	4.968,41	4.968,41	4.968,41	4.968,41	4.968,41	4.968,41
- Kapuk	Ha	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
- Jambu mete	Ha	418,50	418,50	418,50	418,50	418,50	418,50
- Sagu	Ha	742,71	742,71	742,71	742,71	742,71	742,71
- Nilam	Ha	422,82	422,82	422,82	422,82	422,82	422,82
- Aren	Ha	794,64	794,64	794,64	794,64	794,64	794,64
- Vanili	Ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

* Baseline 2020



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan rencana strategi Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, selain didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategi Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2019-2022, juga mempertimbangkan berbagai isu strategis baru, peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan kondisi sumber daya yang dimiliki. Adapun target sasaran utama pembangunan perkebunan yang akan dicapai selama periode tersebut adalah: 1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; 2) Hilirisasi Komoditas Perkebunan melalui Dukungan Sarana Prasarana, Pengawasan Sarana Prasarana dan Peredaran Benih; 3) Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat; 4) Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan; 5) Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai Standar; dan 6) Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan. Proyeksi sasaran utama pembangunan perkebunan dapat terwujud dan berkontribusi secara optimal di tahun 2023-2026 ketika Dokumen Rencana Strategi Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan selama 4 tahun ke depan dijalankan sesuai koridor.

Rencana strategis Dinas Perkebunan yang terdiri dari 8 bab ini dibuat sebagai bagian dari wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadikan sektor Perkebunan sebagai motor penggerak perekonomian di daerah ini. Para *stakeholders* (OPD dan pihak lain, termasuk pihak swasta) bisa terlibat sejak awal secara terencana dalam pembangunan Perkebunan, termasuk dalam hal rencana pendanaan secara lintas OPD, pemerintah pusat melalui pendanaan dari APBN ataupun dengan pihak swasta. Melalui Renstra ini pula, target-target yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah di sektor Perkebunan bisa diketahui, dan bisa dimaksimalkan, selain itu juga menjadi acuan bagi Renstra-renstra Perkebunan di semua Kabupaten di Provinsi ini. Karena itu dengan tekad kerja keras, adaptif dan kolaboratif sasaran yang tertuang dalam rencana strategis ini optimis dapat tercapai.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN

SKEMA PEMETAAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026

<p>VISI MISI RPJP : MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, DAERAH YANG MAJU, DAN MANUSIA YANG MALAQBI</p> <p>TUJUAN DAERAH: MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH (Pendapatan Perkapita)</p> <p>SASARAN DAERAH: MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DALAM Mendukung PEREKONOMIAN DAERAH (Persentase Pertumbuhan Ekonomi)</p>																	
<p>TUJUAN DINAS: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perkebunan Berbasis Kawasan Perkebunan Berkelanjutan yang Adaptif Inovatif dan Transformasi Digital (Kontribusi PDRB Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sulawesi Barat)</p>																	
<p>SASARAN DINAS (SS1): Meningkatnya Produksi Hasil Komoditas Perkebunan</p>							<p>SASARAN DINAS (SS2): Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil, Pemberdayaan, dan Penguatan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan</p>										
<p>INDIKATOR SS1.1: Peningkatan Produksi rata-rata komoditas perkebunan</p>				<p>INDIKATOR SS1.2: Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas perkebunan</p>			<p>INDIKATOR SS2.1: Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP-R)</p>										
<p>STRATEGI 1: Gerakan Pengembalian Kejayaan Kakao, Kopi dan Kelapa Sulbar</p>		<p>STRATEGI 2: Meningkatkan pengendalian penyebaran OPT, DPI dan GUP pada tanaman perkebunan</p>		<p>STRATEGI 3: Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan sarana dan pemanfaatan sarana produksi perkebunan yang legal</p>		<p>STRATEGI 4: Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat</p>		<p>STRATEGI 5: Desain Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan</p>		<p>STRATEGI 6: Meningkatkan layanan standarisasi mutu, dan legalitas usaha perkebunan</p>		<p>STRATEGI 7: Pemenuhan Hilirisasi komoditas Perkebunan</p>		<p>STRATEGI 8: Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani</p>	<p>STRATEGI 9: Pengembangan Agrowisata Perkebunan</p>	<p>STRATEGI 10: Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan</p>	<p>STRATEGI 11: Pengembangan Pendataan CPCL berbasis Digital</p>
<p>KEBIJAKAN 1: Perluasan dan perbaikan tanaman berbasis kawasan/sentra produksi</p>	<p>KEBIJAKAN 15: Pengembangan prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 3: Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan</p>		<p>KEBIJAKAN 4: Pengembangan sarana dan pemanfaatan prasarana perkebunan</p>		<p>KEBIJAKAN 5: Mendorong Ketersediaan Benih Unggul dan Bersertifikat</p>		<p>KEBIJAKAN 6: Kerjasama Perguruan Tinggi dalam hal Perencanaan dan Pengembangan Komoditas Strategis Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 7: Menjalinkan Kemitraan Inovasi Teknologi dan Pemasaran Komoditas Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 2: Pengembangan komoditas terindikasi geografis (ig)</p>	<p>KEBIJAKAN 8: Penanganan Standarisasi dan Pengawasan Mutu, serta Pembinaan Usaha Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 9: Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil</p>	<p>KEBIJAKAN 10: Peningkatan Penerapan, Penanganan Pascapanen, dan Fasilitasi Pemasaran Komoditas Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 11: Mendorong Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani</p>	<p>KEBIJAKAN 12: Pemenuhan Pengembangan Agrowisata Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 13: Pengembangan Desa Mandiri Benih Unggul Komoditas Perkebunan</p>	<p>KEBIJAKAN 14: Tersedianya Database Kelompok Tani berbasis Aplikasi</p>
<p>PROGRAM 3: Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p>		<p>PROGRAM 4: Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>		<p>PROGRAM 2: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p>			<p>PROGRAM 5: Program Perizinan Usaha Pertanian</p>							<p>PROGRAM 6: Program Penyuluhan Pertanian</p>			
<p>SASARAN DINAS (SS3): Tercapainya Penguatan Manajemen Kinerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Indeks RB)</p>																	
<p>STRATEGI 12: Pembinaan dan pemberian dukungan adm. pengelolaan keuangan, dan perencanaan serta Implementasi RB berdasarkan roadmap</p>																	
<p>KEBIJAKAN 15: Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa</p>																	
<p>PROGRAM 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p>																	

